

**KAPASITAS LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA
PADANG DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

UNIVERSITAS ANDALAS
SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

NADILA AULIA

BP. 2110833005



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

ABSTRAK

Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat justru menjadi salah satu dari dua daerah di Sumatera Barat yang belum membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagaimana yang diwajibkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kondisi ini menyebabkan P2TP2A menjalankan peran ganda sebagai pelaksana pelayanan terpadu, yang seharusnya menjadi tugas UPTD PPA. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kapasitas lembaga P2TP2A dalam upaya pemenuhan hak korban kekerasan berdasarkan amanat UU TPKS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peningkatan kapasitas menurut Deborah Eade yang terdiri atas 3 dimensi: *investing in people*, *investing in organisations*, dan *networks*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A Kota Padang menghadapi tantangan yang serius dalam aspek sumber daya manusia, khususnya kekurangan pendamping yang berdampak pada tingginya beban kerja dan peran ganda. Proses rekrutmen tidak dijalankan sesuai dengan perspektif birokrasi. Selain itu, belum adanya pelatihan internal yang terstruktur bagi anggota. Pada dimensi organisasi, belum adanya upaya regenerasi dalam struktur organisasi yang berkelanjutan meskipun lembaga kekurangan tenaga aktif. Serta ketiadaan wewenang dalam pengelolaan anggaran juga membatasi efektivitas layanan kepada korban. Dilihat dari sisi jejaring, P2TP2A cukup aktif menjalin jejaring dengan berbagai *stakeholder* eksternal dalam penanganan kasus, hubungan kerja sama ini menyesuaikan dengan kebutuhan kasus meskipun sebagian besar kerja sama tersebut belum diformalkan melalui MoU.

Kata Kunci: Kapasitas Lembaga, Kekerasan Seksual, Pelayanan



ABSTRACT

Padang, the city that serves as the capital of West Sumatera, is ironically one of only two regions in West Sumatera that has not yet develop Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), as mandated by Undang-Undang No.12 of 2022 regarding Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). This condition has led to P2TP2A performing a dual role as the provider of integrated services, which should have fall under the responsibility of the UPTD PPA. In addressing this issue, this research aims to explain and analyze the institutional capacity of P2TP2A in ensuring the rights of sexual violence victims, in accordance with the UU TPKS. This research applies a qualitative case study approach and uses Deborah Eade's capacity-building theory, which divided into three dimensions: investing in people, investing in organisations, and networks. The findings reveal that P2TP2A Padang encounters serious issues in the aspect of human resources, particularly insufficient caseworkers that leads to heavy workload and dual roles. The recruitment process were not done based on bureaucratic principles, also inadequate training for staff members. Froman organisations point of view, the absence of regeneration and the absence of authority over budget management further limits the effectiveness of the services provided to victims. In terms of networking, P2TP2A is actively involved in building connections with various external stakeholders in case handling, these collaborations are typically adapted to each case's needs, while most of them not been formalized through the Memoranda of Understanding (MoUs).

Keywords: Institutional Capacity, Sexual Violence, Services

